



LAMPUNG SAI

JUNI 2021 EDISI 6



📣 TOPIK UTAMA

- Kadiv Keimigrasian Kanwil Lampung Buka Rakor Timpora 3 Kabupaten
- Kanwil Lampung Gelar Sosialisasi Pencegahan Pelanggaran KI
- Pemeriksaan BPK, Kemenkumham Berhasil Raih Opini Wajar Tanpa Pengecualian

📺 LIPUTANKHUSUS

- Audiensi dengan Bupati Tulang Bawang Barat, Plt. Kakanwil: “Kemenkumham Lampung ingin bermanfaat untuk Lampung”
- Kanwil Lampung Gelar Acara Sosialisasi Teknis Pemasyarakatan dengan Tema Pengembangan SPPT-TI Bersama APH



5 PESAN MENKUMHAM

Prof. Yasonna H. Laoly, S.H., M.Sc., Ph.D.



- 1 **Utamakan Akuntabilitas
kedepankan Integritas**
- 2 **Bangun Sinergitas serta
manajemen organisasi
yang sehat dan cerdas**
- 3 **Jabatan adalah amanah,
terima dengan tanggung-
jawab dan tinggalkan
jejak yang baik**
- 4 **Kuasai pengelolaan dan
penggunaan anggaran
sesuai prinsip akunta-
bilitas dan transparansi**
- 5 **Perkuat sinergi dan
kolaborasi internal serta
bangun kerjasama tim
yang baik**



icare

e|gov

REFORMASI
HUKUM

PEMAJUAN
HAK ASASI MANUSIA

WAYS THE BEST



Sekapur Sirih



Assalamualaikum Wr. Wb.,
Salam Sejahtera untuk kita semua,
Tabik pun...

Puji dan syukur marilah kita senantiasa sampaikan kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya, kita masih diberikan kesehatan untuk dapat bekerja dan berkontribusi untuk negara.

Pada bulan kita mendapat kabar baik jika Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap laporan hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2020.

Capaian ini merupakan kali ke delapan bagi Kemenkumham yang berhasil mempertahankan opini WTP untuk Tahun Anggaran 2020. Dimana setengah lusin dari jumlah tersebut diperoleh secara berturut-turut sejak 2015.

Semoga capaian ini dapat terus mendorong kita untuk lebih semangat berkinerja dan mendorong pengelolaan keuangan maupun Barang Milik Negara (BMN) dapat dilaksanakan secara transparan, akuntabel, efektif, dan efisien. .



IDA ASEP SOMARA

PI. KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENKUMHAM LAMPUNG

Akhir kata Wabillahi taufiq wal hidayah,
Wassalamualaikum Wr. Wb.
Salam Pembaharuan!



PELINDUNG

Plt. Kepala Kantor Wilayah
IDA ASEP SOMARA

PENGARAH

Kepala Divisi Administrasi
IDA ASEP SOMARA

Kepala Divisi Yankum dan HAM
NUR ICHWAN

Kepala Divisi Keimigrasian
IS EDY EKOPUTRANTO

Kepala Divisi Pemasarakatan
FARID JUNAEDI

PENANGGUNGJAWAB

Kepala Bagian Program dan Humas
BASNAMARA

PEMIMPIN REDAKSI

Kasubag Humas RB & TI
ARLISA NOVIRANTONO

EDITOR

ARLISA NOVIRANTONO, DAMBA WIRATAMA, REZA KHAIRUL FITRA, PIJAR PUTRA ARINDA, RIZQI DHITA WARDHANIK, NABIL AN NAFIS

FOTOGRAFER, REDAKSI DAN BERITA

ARLISA NOVIRANTONO, DAMBA WIRATAMA, REZA KHAIRUL FITRA, PIJAR PUTRA ARINDA, RIZQI DHITA WARDHANIK, NABIL AN NAFIS

LAYOUT & DESAIN GRAFIS

NABIL AN NAFIS

Dari Redaksi



Assalamualaikum Wr. Wb

Tabik pun...

Kami segenap redaksi E-Buletin Lampung Sai Menyampaikan puji syukur kepada Tuhan YME yang telah melimpahkan rahmat berupa kesehatan sehingga kami dapat menerbitkan E-Buletin Lampung Sai edisi ke-6 ini dengan lancar.

Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Plt. Kepala Kantor Wilayah, Pejabat Tinggi Pratama dan semua pihak yang telah mendukung tim redaksi untuk berkarya serta terus-menerus melakukan inovasi dan pembaharuan. Pada edisi E-Buletin yang ke-6 ini, kami menyajikan liputan khusus audiensi Plt. Kakanwil ke Tubaba sebagai langkah sinergi dan kontribusi Kanwil Lampung untuk terus melayani masyarakat lampung.

Ada juga liputan tentang sosialisasi teknis pemsarakatan yang dihadiri oleh Staf ahli Menteri Hukum dan HAM Bidang Hubungan Antar Lembaga, Dhanana Putra. Semoga dengan terselenggaranya acara tersebut hubungan APH baik di wilayah dan daerah dapat terus terjaga.

Kami segenap redaksi mohon maaf apabila terdapat kesalahan tulisan. Semangat pembaharuan akan selalu mengiringi langkah tim redaksi untuk terus melakukan inovasi. Untuk itu kritik dan saran yang membangun sangat kami butuhkan agar E-Buletin Lampung Sai lebih baik lagi. Salam Pembaharuan! Lampung Sai Pasti Kece! Pasti WBK!

Tim Redaksi.





17

Kepala Divisi Keimigrasian Kanwil
Kemenkumham Lampung Buka Ra-
kor Timpora 3 Kabupaten

19

Pemeriksaan BPK, Kemenkum-
ham Berhasil Raih Opini Wajar Tan-
pa Pengecualian



08

Ikuti Upacara Peringatan
Hari Lahir Pancasila,
ASN Kanwil Lampung
Gunakan Pakaian Adat



09

Pelaksanaan SKD Citar
Poltekip/Poltekim Tahun
2021, Kanwil Lampung
Lakukan Koordinasi
dengan BKN Provinsi
Lampung



12

Beri Arahan di Hadapan
Taruna Poltekip, Ptt.
Kakanwil Amanatkan
untuk Senantiasa
Menjaga Perilaku dan
Attitude

21

Audiensi dengan Bupati Tulang Bawang Barat, Plt. Kakanwil: "Kemendukham Lampung ingin bermanfaat untuk Lampung"



13



Plt. Kakanwil Lampung Membuka Secara Resmi Kegiatan Supervisi Penyusunan Pagu Indikatif Tahun Anggaran 2022

15



Plt. Kakanwil Resmikan Kegiatan Bimbingan Kemandirian dan Launching Aplikasi SIMPAPA, Hallo Bro pada Bapas Bandar Lampung

16



Kunjungan Kerja Perdana Kepala Divisi Keimigrasian ke Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandar Lampung

24



Kanwil Lampung Gelar Acara Sosialisasi Teknis Pemasaryakatan dengan Tema Pengembangan SPPT-TI Bersama APH

27



Sosialisasikan Perubahan UU Ormas, Kanwil Kemendukham Lampung Dorong Peran Serta Ormas Dalam Keutuhan NKRI

29



Deteksi Dini Gangguan Kamtib dan Cegah Peredaran Narkoba, Jajaran Pemasaryakatan Gelar Razia Serentak

30



Plt. Kakanwil Monitoring dan Evaluasi Realisasi Anggaran Semester I Pada Satuan Kerja Secara Virtual

31



Beri Perlindungan Bagi Pelaku Usaha, Kantor Wilayah Lampung Gelar Sosialisasi Pencegahan Pelanggaran KI

33



Cegah Penyebaran Covid 19, Ketua Komisi I DPRD Propinsi Lampung Gandeng Penyuluh Hukum Kemenkumham Lampung

35



Kanwil Lampung Selenggarakan Kegiatan Edukatif Terkait Penyusunan Prolegda, Naskah Akademik Serta Pedoman Analisis dan Evaluasi Hukum

37



Persiapan Penilaian Kab/Kota Peduli HAM, Kadiv Yankum Audiensi dengan Sekda Pemkab Pesawaran

39



Kanwil Kemenkumham Lampung Fasilitasi Harmonisasi Ranperda di Kabupaten Tulang Bawang dan Tulang Bawang Barat

41



Kadiv Keimigrasian Berikan Penguatan Dalam Bidang Teknis dan Fasilitatif Pada Kanim Kotabumi

42



Kanwil Lampung Gelar Sosialisasi Layanan AHU Pembinaan PPNS Provinsi Lampung

44



Plt. Kakanwil Kemenkumham Lampung Ikuti Puncak Peringatan HANI 2021 Secara Bersama Melalui Virtual



Ikuti Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila, ASN Kanwil Lampung Gunakan Pakaian Adat

Selasa (01/06/2021) Pelaksanaan Upacara Peringatan hari Lahir Pancasila Tahun 2021 bersama Presiden Republik Indonesia yang terpusat dari Gedung Pancasila, Jalan Taman Pejambon nomor 6 Jakarta dan diselenggarakan secara Virtual melalui kanal-kanal media yang disebarluaskan secara terpusat oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).

Di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Lampung seluruh Aparatur Sipil Negara mengikuti secara virtual di kediaman masing-masing dengan menggunakan pakaian adat.

Dengan tema "Pancasila dalam Tindakan, Bersatu untuk Indonesia Tangguh", Joko Widodo

menyampaikan dalam sambutannya bahwa pada masa sekarang semangat perjuangan tempo dulu sudah mulai ditinggalkan karena adanya kepentingan-kepentingan tertentu.

Joko Widodo yang akrab dipanggil Jokowi juga menyampaikan bahwa dengan adanya Peringatan Hari Lahirnya Pancasila semoga bisa memperkokoh ideologi di dalam jiwa masyarakat.

“Peringatan Hari Lahir Pancasila setiap tanggal 01 Juni harus benar-benar kita manfaatkan untuk mengkokohkan nilai-nilai Pancasila dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara,” ujar Presiden Republik Indonesia.





Pelaksanaan SKD Citar Poltekip/Poltekim Tahun 2021, Kanwil Lampung Lakukan Koordinasi dengan BKN Provinsi Lampung

Dalam rangka Persiapan Pelaksanaan Kegiatan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) pada Seleksi Penerimaan Calon Taruna/Taruni Politeknik Ilmu Pemasaran (POLTEKIP) dan Politeknik Ilmu Imigrasi (POLTEKIM) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun Anggaran 2021, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Lampung melakukan Koordinasi dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) Provinsi Lampung. Jum'at (04/06/2021)



Peninjauan sarana dan prasarana terkait dengan pelaksanaan kegiatan SKD di BKN Provinsi Lampung

Plt. Kepala Kantor Wilayah Lampung, Ida Asep Somara bersama dengan Kepala Bagian Umum, Hadiyanto dan JFT Analisis Kepegawaian Muda, Dedy Nasrizal disambut kedatangannya oleh Kepala BKN Provinsi Lampung, Muhamad Mujaedi. Dalam keda-

tangannya Ida Asep Somara melakukan peninjauan sarana dan prasarana terkait dengan pelaksanaan kegiatan SKD serta melakukan koordinasi tentang alur pelaksanaan kegiatan SKD di UPT BKN Regional V Bandar Lampung.

Pelaksanaan kegiatan SKD yang dilaksanakan dari tanggal 6 Juni sampai dengan 14 Juni 2021 akan tetap mematuhi protokol Kesehatan pencegahan penyebaran Covid-19, dimana para peserta harus memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak dan ruangan akan dilakukan sterilisasi setiap SKD berakhir.

SKD Catar Poltekip dan Poltekim Kementerian Hukum dan HAM TA 2021 Resmi Digelar

Persiapan Pelaksanaan Kegiatan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) pada Seleksi Penerimaan Calon Taruna/Taruni Politeknik Ilmu Pemasaryakatan (POLTEKIP) dan Politeknik Ilmu Imigrasi (POLTEKIM) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun Anggaran 2021 resmi digelar. Minggu (06/06/2021)

Bertempat di Kantor Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Kepegawaian Negara (BKN) Regional V Bandar Lampung sebanyak 46 peserta dari 50 peserta mengikuti jalannya Kegiatan SKD pada sesi pertama ini. Sebelum memasuki tahap Computer Assisted Test (CAT) para peserta diperiksa suhu tubuh, mencuci tangan dan pemakaian masker dilanjutkan



Panitia memeriksa peserta SKD sebelum memasuki ruangan untuk melaksanakan CAT

dengan kelengkapan administrasi, dimulai dari kartu peserta, penandatanganan absensi, registrasi online untuk mendapatkan PIN, dan penjelasan tentang tata tertib maupun ambang batas nilai (Passing Grade).

Plt. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung, Ida Asep Somara didampingi dengan Kepala Bagian

Umum, Hadiyanto, Kepala Bidang Perizinan dan Informasi Keimigrasian, Imam Santoso, Kepala Sub Bagian Kepegawaian, TU dan Rumah Tangga, Yulinar Trisia beserta Panitia SKD Kantor Pusat dan Kantor Wilayah Lampung.



Plt. Kakanwil, Ida Asep Somara memberikan pengarahan kepada peserta SKD

“Begitu pula terkait informasi pelaksanaan seleksi, panitia hanya menyampaikan informasi resmi melalui laman dan akun medsos sebagaimana didalam pengumuman” Ujar Ida Asep sebelum menutup sambutan.

Ida Asep Somara memberikan sambutan sebagai perwakilan dari Kepala Biro Kepegawaian selaku Ketua Panitia Seleksi mengingatkan kepada seluruh peserta SKD Catar Poltekip dan Poltekim untuk bersemangat dan percaya kepada diri sendiri. Pasalnya tes SKD yang berlangsung merupakan “murni” hasil dari peserta sendiri, maka jangan percaya kepada pihak-pihak



CAT seleksi Kompetensi Dasar (SKD) pada Seleksi Penerimaan Calon Taruna



serah terima hasil ujian SKD keseluruhan dari Panitia BKN kepada Panitia Kantor Wilayah Lampung

yang menawarkan segala bentuk kelulusan SKD.

Selanjutnya, Kepala BKN Provinsi Lampung, Muhamad Mujae di mengingatkan kepada seluruh peserta agar patuh tentang protocol Kesehatan pencegahan penyebaran Covid-19. Dimana peserta setelah melaksanakan Kegiatan SKD langsung meninggalkan tempat dan Kembali ke kediaman masing-masing sesuai dengan perintah Gugus Tugas Covid-19 Kota Bandar Lampung

Serah Serah Terima Hasil Ujian SKD Keseluruhan

Pelaksanaan Kegiatan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) pada Seleksi Penerimaan Calon Taruna/ Taruni Politeknik Ilmu Pemasaran (POLTEKIP) dan Politeknik Ilmu Imigrasi (POLTEKIM) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun Anggaran 2021 telah berakhir. Senin (14/06/2021). Pelaksanaan yang telah berjalan selama 9 (Sembilan) hari sebanyak 26 sesi secara keseluruhan

dimana masing-masing sesi sebanyak 50 peserta berlangsung di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Kepegawaian Negara (BKN) Provinsi Lampung berjalan dengan tertib dan aman serta mematuhi protokol Kesehatan penyebaran Covid-19.

Plt. Kepala Kantor Wilayah, Ida Asep Somara didampingi dengan Kepala Divisi Keimigrasian, Is Eko-putranto, Kepala Bagian Umum, Hadiyanto, Kepala Sub Bagian Kepegawaian, TU, dan RT, Yulinar Trisia beserta Panitia Pusat, Panitia Kantor Wilayah dan Panitia BKN memastikan SKD yang digelar bersih dan transparan.

da Asep menyampaikan kepada seluruh peserta untuk berdoa dan berusaha, karena kelulusan yang didapatkan merupakan jerih payah dari masing-masing peserta. Tak lupa Kepala UPT BKN, Muhammad Mujae di menyampaikan bahwa ada sedikit perubahan pada komposisi soal SKD yakni pada bagian Tes Karakteristik Pribadi (TKP), yang semula berjumlah 143 soal kini menjadi 156 soal

Diakhir Kegiatan SKD, diadakan pelaksanaan serah terima hasil ujian SKD keseluruhan dari Panitia BKN kepada Panitia Kantor Wilayah Lampung. Perlu diketahui pada hari terakhir ini Jumlah Peserta yang hadir sebanyak 134 dari 142 peserta, sebanyak 99 peserta memenuhi Passing Grade dengan nilai tertinggi 467.



Beri Arahan di Hadapan Taruna Poltekip Peserta Magang, PKL & KKN. Plt. Kakanwil Amanatkan untuk Senantiasa Menjaga Perilaku dan Attitude.

Pada Senin (07/06/21), bertempat di Ruang Klinik Akuntabilitas, Plt. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM, Ida Asep Somara didampingi Kepala Bagian Umum, Hadiyanto; Kepala Bidang Pembinaan, Bimbingan, & Teknologi Informasi Pemasaryakatan, Mishbahuddin; dan Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Tata Usaha, & Rumah Tangga, Yulinar Trisia; memberikan pengarahan kepada Taruna/i yang akan melaksanakan Magang, PKL maupun KKN pada Unit Pelaksana Teknis di Jajaran Kantor Wilayah Lampung.

Ida Asep Somara, menyoroti adanya tambahan soal pada Tes Karakteristik Pribadi (TKP) dalam Seleksi Kemampuan Dasar Calon Taruna Poltekip/Poltekim merupakan wujud perhatian peme-

rintah bahwa aspek pribadi yang berkarakter menjadi poin yang penting dalam proses kaderisasi ASN Kemenkumham.

"10 soal itu berkaitan dengan tes kepribadian, perilaku, attitude, akhlak." Ujar Ida Asep.

Ida Asep menyampaikan bahwa sebagai seorang kader, Taruna Kemenkumham harus berkemampuan untuk beradaptasi. Menurut Ida Asep, Taruna Kemenkumham adalah sosok Kader yang Agile dan Smart.

"Saya kira untuk beradaptasi itu menjadi hal yang biasa, karena Anda memang dilatih untuk menjadi orang yang senantiasa adaptif dengan perubahan yang begitu cepat." Lanjut Ida Asep.

Ida Asep memberi amanat kepada para Taruna/i, bahwa sikap dan perilaku yang baik harus selalu menyertai pengetahuan dan keahlian seorang Taruna/i agar dalam pengabdianya kelak Taruna/i Kemenkumham mampu

"Arahan atau amanat saya untuk Anda: yang harus dijaga betul adalah perilaku, attitude. Bagaimana bersopan santun. Jaga nama baik civitas akademika Poltekip, nama baik Kementerian Hukum dan HAM, nama baik harkat martabat keluarga" Ida Asep mengarahkan.

menjadi ASN yang berkarakter dan berdaya saing.

"Arahan atau amanat saya untuk Anda: yang harus dijaga betul adalah perilaku, attitude. Bagaimana bersopan santun. Jaga nama baik civitas akademika Poltekip, nama baik Kementerian Hukum dan HAM, nama baik harkat martabat keluarga" Ida Asep mengarahkan.



Plt. Kakanwil Lampung Membuka Secara Resmi Kegiatan Supervisi Penyusunan Pagu Indikatif Tahun Anggaran 2022

Dalam rangka untuk memberikan pemahaman tentang penyusunan program dan Rencana Kerja Anggaran (RKA-K/L) Tahun Anggaran 2022 bagi seluruh UPT (Unit Pelaksana Teknis). Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung mengadakan kegiatan Supervisi Penyusunan Pagu Indikatif Tahun Anggaran 2022 untuk mencapai kesepakatan tentang penyusunan program dan kegiatan yang dilaksanakan di Kantor Wilayah berikut satuan-satuan kerjanya diajarannya.

Kegiatan dihadiri oleh Plt. Kepala Kantor Wilayah : Ida Asep Somara, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM : Nur Ichwan, Kepala Bagian Program dan Humas : Basnamara, Kepala Bagian Umum : Hadiyanto, Kepala Subbagian Program dan Pelaporan : Gunawan Ali, dan Kepala Subbagian Humas, RB, & TI : Arlisa Noviriantono beserta para peserta berasal dari perwakilan seluruh UPT. Kegiatan yang bertempat di Aula Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung ini direncanakan akan berlangsung selama 2 hari pada tanggal 08-09 Juni 2021.

Kepala Bagian Program dan Humas, Basnamara selaku Ketua Penyelenggara mengawali acara dengan menyampaikan laporan penyelenggaraan yang dilanjutkan dengan pengarahan oleh Plt. Kepala



Kepala Bagian Program dan Humas, Basnamara selaku Ketua Penyelenggara mengawali acara dengan menyampaikan laporan penyelenggaraan

la Kantor Wilayah, Ida Asep Somara sekaligus membuka secara resmi Kegiatan Supervisi Penyusunan Pagu Indikatif Tahun Anggaran 2022.

Dalam arahnya, Ida Asep Somara menyam-



**“Reformasi yang terjadi di bidang perencanaan dan penganggaran di seluruh Kementerian/ Lembaga termasuk di Kementerian kita, proses penyusunan anggarannya dimulai dari melakukan Analisa Kebutuhan, hingga terbit Pagu Indikatif dan Pagu Anggaran, hal ini bukan bermaksud mempersulit Bapak/Ibu sekalian namun justru membantu ketika proses pelaksanaan anggaran tersebut sudah dalam tahap pelaksanaan dan pertanggungjawaban.”
Ucap Ida.**



pemeriksaan penyusunan RKAK/L masing-masing Satuan Kerja oleh panitia penyelenggara yang bertugas.

paikan penyelenggaraan Supervisi Penyusunan Pagu Indikatif Tahun Anggaran 2022 ini bertujuan agar rencana kerja anggaran yang disusun tepat sasaran, tepat biaya dan juga tepat waktu dalam pelaksanaannya sehingga target kinerja dapat terlaksana dengan baik. Supervisi ini difokuskan pada Kelayakan Anggaran untuk menghasilkan Output, Kepatuhan dalam penerapan ka-idah Perencanaan penganggaran, Kepatuhan mencan-tum-

kan penandaan sesuai kategori keluaran (Output), Kelengkapan dokumen pendukung, serta kelayakan dan kesesuaian rincian anggaran yang digunakan.

Menutup sambutan, Ida Asep somara berharap penyusunan RKAK/L tahun ini lebih baik dari tahun sebelumnya. Perencanaan Penyusunan Anggaran yang baik akan menghasilkan DIPA yang berkualitas yang tentunya akan memudahkan pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran, pencapaian target realisasi anggaran serta target kinerja sesuai yang dicanangkan oleh kementerian kita.

Kegiatan dilanjutkan dengan pemeriksaan penyusunan RKAK/L masing-masing Satuan Kerja oleh panitia penyelenggara yang bertugas.





Plt. Kakanwil Resmikan Kegiatan Bimbingan Kemandirian dan Launching Aplikasi SIMPAPA, Hallo Bro pada Bapas Bandar Lampung

Pelaksanaan Kegiatan Bimbingan Kemandirian Klien Balai Pemasarakan Bandar Lampung Tahun 2021 dan Launching Aplikasi SIMPAPA (Sistem Informasi Manajemen Pengawasan dan Pemasaran) dan Hallo Bro berlangsung di Aula Kantor Bapas Bandar Lampung. Selasa (08/06/2021)



Dalam acara peresmian, Plt. Kepala Kantor Wilayah, Ida Asep Somara mengatakan, aplikasi SIMPAPA difungsikan untuk mengawasi keberadaan dan kegiatan klien Bapas yang merupakan para mantan narapidana yang saat ini tersebar di tengah-tengah masyarakat.

"Pada saat mereka juga punya aktifitas produktifitas, tapi mengalami kesulitan dalam hal

pemasarannya, maka aplikasi ini bisa membantu mempromosikan karya-karya mereka," Ujar Ida Asep.

Aplikasi SIMPAPA ini merupakan inovasi dari Bapas Bandar Lampung yang nantinya akan dilaporkan ke Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin) Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Dalam Kegiatan ini juga turut hadir Kalap-

as Perempuan Kelas IIA Bandar Lampung, Kepala Rutan Kelas I Bandar Lampung, Kepala Rupasban Bandar Lampung, dan sejumlah perwakilan Klien Bapas Kelas IIA Bandar Lampung



Kunjungan Kerja Perdana Kepala Divisi Keimigrasian ke Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandar Lampung

Kepala Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Lampung, Is Edy Ekoputranto melaksanakan Kunjungan Kerja pertama ke Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandar Lampung. Senin (07/06/2021)



"Komitmen bersama untuk membangun Zona Integritas (ZI) Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) harus dilakukan agar terciptanya keadaan harmonis dan sinergis untuk pencapaian tujuan," Jelas Kepala Divisi Keimigrasian disela-sela pengarahannya.

Kegiatan diawali dengan ucapan selamat datang dan penjelasan singkat terkait profil Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandar Lampung.

"Komitmen bersama untuk membangun Zona Integritas (ZI) Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) harus dilakukan agar terciptanya keadaan harmonis dan sinergis untuk pencapaian tujuan. Selain itu perubahan mindset berpikir dari apa yang kantor

berikan kepada kita harus diubah menjadi apa yang dapat kita berikan kepada kantor" Jelas Kepala Divisi Keimigrasian disela-sela pengarahannya.

Is edy menjelaskan bahwa hal ini sangat penting dilakukan dikarenakan kunci dari sebuah keberhasilan adalah terciptanya kolaborasi dan komitmen bersama. "Itu adalah kunci dari sebuah keberhasilan" tegasnya.



Kepala Divisi Keimigrasian Kanwil Kemenkumham Lampung Buka Rakor Timpora 3 Kabupaten

Tulang Bawang (09/06/2021)
Bertempat di Hotel Le Mans
Tulang Bawang Kepala
Divisi Keimigrasian Kantor Wila-
yah Lampung, Is Edy Ekoputranto
membuka secara resmi Rapat Ko-
ordinasi Tim Pengawasan Orang
Asing (TIMPORA) Tingkat Kabu-
paten yang meliputi 3 (tiga) Kabu-
paten yaitu Kab. Tulang Bawang,
Kab. Tulang Bawang Barat, Kab.
Mesuji yang merupakan wilayah
Kerja dari Kantor Imigrasi Kelas
III Non TPI Kotabumi.





“Rapat Koordinasi di 3 Kabupaten yang dilaksanakannya saat ini sangat penting dalam rangka melakukan kolaborasi dan koordinasi untuk membuka wacana dan wawasan antar instansi, lembaga sehingga mampu membawa permasalahan bagi masyarakat dan negara,” ujar Is Eko.

Rapat Koordinasi dihadiri oleh Bupati Tulang Bawang yang diwakili oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja, serta stakeholder dari lembaga instansi terkait terdiri Kepolisian Resor, Kodim, Kejaksaan Negeri, Badan Intelijen Strategis, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Dinas Tenaga Kerja yang merupakan unsur anggota TIMPORA dari masing-masing Kabupaten yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan terhadap orang asing. Serta dihadiri pula oleh Kepala Bidang Inteldak dan Kepala Bidang Perizinan dan Informasi Keimigrasian serta Kepala Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Kotabumi beserta jajaran.

Dalam sambutannya Kadisnaker, Sumarno mewakili Bupati Tulang Bawang menyampaikan sinergitas antar anggota TIMPORA harus senantiasa terjalin dengan Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Kotabumi dalam hal pengawasan orang asing agar tercipta stabilitas keamanan di wilayah khususnya di masa pandemi Covid-19 yang masih belum berakhir sampai saat ini.

Acara dilanjutkan dengan pemberian plakat kenang-kenangan dari Kepala Divisi Keimigrasian kepada perwakilan Pemerintah Kabupaten masing-masing Daerah, serta dilanjutkan dengan penyetaman pin TIMPORA oleh Kepala Divisi Keimigrasian yang diberikan kepada Kepala Kesbangpol selaku perwakilan anggota TIMPORA dari masing-masing Kabupaten.



Peserta mengikuti jalannya rapat Tim Pengawasan Orang Asing



Pemberian cinderamata dari Kepala Divisi Keimigrasian kepada perwakilan Pemerintah Kabupaten masing-masing Daerah



Beri Perlindungan Bagi Pelaku Usaha, Kantor Wilayah Lampung Gelar Sosialisasi Pencegahan Pelanggaran KI

Kamis (17/06), Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung kembali menggelar kegiatan Sosialisasi Kekayaan Intelektual Tahun 2021 bertempat di Hotel Emersia, Bandar Lampung. Maksud dan tujuan diselenggarakannya kegiatan ini sebagai sarana diskusi dan sosialisasi Pencegahan Pelanggaran Kekayaan Intelektual yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang Pencegahan Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Provinsi Lampung.

Kegiatan dihadiri oleh Plt.Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Lampung: Ida Asep Somara, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM: Nur Ichwan, Kepala Bidang Pelayanan Hukum: Ignatius MT Silalahi, Kepala Bagian Umum: Hadiyanto, Kepala Bagian Program dan Humas: Basnamara, Kepala Sub Bidang Kekayaan Intelektual: Adil Jaya Negara.

Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Nur Ichwan dalam laporannya menyampaikan kegiatan sosialisasi ini diikuti 150 orang peserta yang terdiri dari Direktorat Reskrimsus, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Dinas Koperasi UMKM dan Per-

industrian, Dekranasda, Asosiasi, UMKM dan pelaku usaha yang ada di Provinsi Lampung.

Plt.Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Lampung, Ida Asep Somara menjelaskan bahwa kegiatan ini sebagai wujud Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Lampung secara riil memberikan perlindungan kepada pelaku usaha di Provinsi Lampung. Sehingga dengan adanya kegiatan ini, dapat memberikan edukasi kepada pelaku usaha untuk memahami pentingnya pendaftaran Kekayaan Intelektual terutama dalam upaya perlindungan hukum bagi para pelaku usaha, pencipta, dan inventor sehingga terbangun per-



Plt. Kakanwil, Ida Asep Somara menjelaskan bahwa kegiatan ini sebagai wujud Kanwil Kemenkumham Lampung secara riil memberikan perlindungan kepada pelaku usaha di Provinsi Lampung



Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Nur Ichwan memberikan laporan jika kegiatan ini dihadiri oleh para stakeholder terkait

samaan persepsi / pemahaman terhadap pentingnya inovasi dan penghargaan inovasi dan mendaftarkan inovasi tersebut.



"Kolaborasi Pemerintah dengan Pelaku Usaha menjadi kunci mencegah pelanggaran Kekayaan Intelektual. Upaya pencegahan tersebut juga didukung oleh eksistensi perangkat norma, kelembagaan, serta sumber daya manusia." tegas Ida.

Menutup sambutannya, Ida berharap melalui kegiatan ini kita dapat mendukung visi Presiden mewujudkan Indonesia menjadi Negara terbesar dalam sektor Digital Economy melalui ekonomi kreatif berbasis kekayaan intelektual dengan usaha untuk meminimalisir terjadinya pelanggaran kekayaan intelektual.

"Diharapkan sosialisasi ini semakin menambah wawasan atau pengetahuan banyak pihak baik sebagai pelaku usaha/ sektor industri, penegak hukum, dan instansi terkait dalam mencegah terjadinya Pelanggaran Kekayaan Intelektual serta menumbuhkan semangat sumber daya manusia yang kreatif dan



Narasumber dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI yaitu Cecep Sarip Hidayat



Mohammad Zimmi Skil dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung sedang memberikan penjelasan

inovatif bagi dunia usaha sesuai dengan ketentuan yang berlaku". tutup Ida.

Selanjutnya kegiatan dilanjutkan dengan penyampaian materi yang disampaikan narasumber dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI yaitu Cecep Sarip Hidayat, Mohammad Zimmi Skil

dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung, dan Ipda Sutomo dari Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Lampung yang ditutup dengan sesi tanya jawab oleh peserta.



Pemeriksaan BPK, Kemenkumham Berhasil Raih Opini Wajar Tanpa Pengecualian

Jakarta - Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap laporan hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2020.

WTP adalah opini audit tertinggi dari BPK terkait pengelolaan anggaran di kementerian atau lembaga negara. Opini ini diterbitkan jika laporan keuangan dianggap telah sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum dengan baik dan bebas dari salah saji material. Laporan Hasil Pemeriksaan BPK dengan Opini WTP diserahkan langsung Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara I BPK RI Bidang Polhukam, Hendra Susanto kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Yasonna H. Laoly, Senin 28/06/2021 pk 10.30 WIB bertempat di Ruang Rapat Menkumham.

Opini atas laporan keuangan disusun dengan mempertimbangkan empat kriteria, yakni kesesuaian laporan keuangan dengan SAP (Standar Akuntansi Pemerintahan), kecukupan pengungkapan sesuai SAP, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta efektivitas SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah).

Dalam mekanismenya, Laporan keuangan wajib disampaikan kementerian/lembaga (K/L) kepada Kementerian Keuangan untuk selanjutnya dikonsolidasikan menjadi LKPP (Laporan Keuangan Pemerintah Pusat).

Capaian ini merupakan kali ke delapan bagi Kemenkumham yang berhasil mempertahankan opini WTP untuk Tahun Anggaran 2020. Dimana setengah lusin dari jumlah tersebut diperoleh secara berturut-turut sejak 2015.

Hasil ini pun melengkapi raihan sempurna terhadap LKPP yang juga menggondol penghargaan serupa. Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK, laporan keuangan LKPP Tahun 2020 mendapatkan opini WTP untuk kelima kalinya

diperoleh pemerintah sejak 2016.

Sejak digelar pada 2004, atau tepatnya setelah Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara terbit, Kemenkumham tercatat sudah delapan kali meraih opini WTP yakni pada tahun 2011, 2013, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, dan 2020. Ini berarti dalam enam tahun terakhir, sejak 2015 hingga sekarang, Kemenkumham berturut-turut meraih opini WTP.

Selain itu, Kemenkumham juga meraih empat kali opini WTP Dengan Paragraf Penjelas, yakni pada tahun 2009, 2010, 2012, dan 2014.

Menkumham, Yasonna H. Laoly mengucapkan terima kasih dan apresiasi, baik kepada BPK maupun kepada seluruh jajaran Kemenkumham, atas tercapainya opini WTP ini. Yasonna mengungkapkan capaian opini WTP murni ini merupakan capaian ke delapan kalinya sejak tahun 2011.

Sejak dirinya memimpin dan bertindak selaku pengguna anggaran di Kemenkumham, Yasonna telah berupaya keras agar



“Terima kasih atas kerja sama yang selama ini terjalin baik antara tim BPK dengan Kemenkumham, sehingga proses pemeriksaan dapat berjalan dengan lancar,” kata Yasonna. “Kami akan terus dan selalu bekerja keras menjaga kepercayaan yang diberikan oleh BPK dengan berupaya meningkatkan kualitas laporan keuangan Kemenkumham secara berkelanjutan,” tambahnya.

pengelolaan keuangan maupun Barang Milik Negara (BMN) dapat dilaksanakan secara transparan, akuntabel, efektif, dan efisien.

“Dalam praktiknya, pengelolaan keuangan dan BMN bukanlah hal yang mudah, karena banyak hal yang harus diperhatikan dan dipatuhi,” ucap Yasonna.

Proses panjang pengelolaan keuangan dimulai dari perencanaan hingga pertanggungjawaban harus mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, memiliki SPIP yang memadai, memperhatikan kesesuaian dengan SAP, serta diungkapkan

secara memadai dalam laporan keuangan. Semua itu dilakukan guna mendukung terwujudnya good governance di lingkungan Kemenkumham.

“Pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK bagi kami juga merupakan sebuah bentuk pembinaan dan evaluasi atas pengelolaan keuangan dan BMN Kemenkumham. Hasil pemeriksaan tersebut menjadi faktor pendorong bagi kami untuk segera memperbaiki diri,” ucap menkumham.

Di sisi lain, Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara I BPK RI Bidang Polhukam, Hendra Susanto mengungkapkan dalam pemeriksaan laporan keuangan Kemenkumham tahun 2020, pihaknya tidak menemukan permasalahan signifikan yang berdampak pada kewajaran penyajian laporan keuangan.

“Menurut kami, laporan keuangan Kemenkumham menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material. Posisi keuangan tanggal 31 Desember 2020, (untuk) realisasi anggaran, operasional, serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut telah sesuai dengan SAP,” kata Hendra.

Hendra menilai, tentunya capaian ini merupakan prestasi yang pantas dibanggakan dan perlu mendapat apresiasi. “Karena opini

ini bukan merupakan hadiah dari BPK, namun merupakan prestasi dan kerja keras dari seluruh jajaran Kemenkumham dalam mengelola dan mempertanggungjawabkan keuangan negara yang dikelola,” tutupnya.

Sementara itu Sekretaris Jenderal Kemenkumham, Andap Budhi Revianto mengapresiasi atas kerja keras, dan kerja sama seluruh jajaran Kemenkumham di dalam penyusunan laporan keuangan ini.

“Mempertahankan capaian opini WTP di tengah situasi pandemi Covid-19 relatif besar tantangannya,” kata Andap.

“Alhamdulillah, kerja keras para pihak di jajaran Kemenkumham, berhasil memberikan laporan keuangan yang terbaik, Apresiasi tinggi saya berikan kepada seluruh jajaran Kemenkumham atas hasil membanggakan ini,” tuturnya.

Dalam pertemuan ini juga dihadiri Wakil Menkumham, Auditor Utama I BPK RI selaku Penanggung Jawab beserta Tim Pemeriksa, para Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Unit Utama Kemenkumham, para Kepala Kantor Wilayah dan Kepala Divisi yang mengikuti kegiatan ini secara virtual, dan para Pejabat Pengelola Keuangan dan BMN di lingkungan Kemenkumham.





Audiensi dengan Bupati Tulang Bawang Barat, Plt. Kakanwil: “Kemenkumham Lampung ingin bermanfaat untuk Lampung”

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Lampung melaksanakan Audiensi dengan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat. Kamis (10/06/2021) Bertempat di Berugo Cottage Komplek Islamic Center, Panaraganjaya, Bupati Tulang Bawang Barat (Tubaba) Umar Ahmad menyambut hangat kedatangan Plt. Kepala Kantor Wilayah Lampung, Ida Asep Somara beserta rombongan.





“Saya berharap dalam kunjungan ini dapat membuahkan hasil yang baik dalam pembangunan masa depan Tulang Bawang Barat, Provinsi Lampung dan Kementerian Hukum dan HAM Lampung” tutup Umar.

Dalam sambutannya, Umar Ahmad menyampaikan nilai-nilai yang mencirikan masyarakat Tubaba, yakni “nemen (kerja keras), nedes (pantang menyerah), nerimo (memiliki keikhlasan)” ujar Bupati Tubaba. Tak lupa Umar mengucapkan terima kasih atas kunjungan dari Plt. Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Lampung beserta rombongan.

“Saya berharap dalam kunjungan ini dapat membuahkan hasil yang baik dalam pembangunan masa depan Tulang Bawang Barat, Provinsi Lampung dan Kementerian Hukum dan HAM Lampung” tutup Umar.

Selanjutnya, Ida Asep Somara menyampaikan bahwa hadirnya pemerintah adalah untuk mendidik akal dan kemampuan intelektual bagi masyarakat. Hal itu guna untuk mensejahterakan lahiriah dan kebahagiaan batiniah masyarakat.

Disela sambutannya, Ida Asep menginginkan Kementerian Hukum dan HAM Lampung dapat bermanfaat untuk Provinsi Lampung. Sesuai dengan tugas dan fungsinya yang terbagi dalam 4 Kelompok, yaitu Divisi Administrasi sebagai dukungan manajemen, Divisi Pe-



Bupati Tulang Bawang Barat (Tubaba) Umar Ahmad memberikan sambutan



Bupati Tubabar bersama Plt. Kakanwil kunjungi pusat oleh-oleh Tulang bawang Barat

masyarakatan yang hadir dalam rangka penegakan hukum, Divisi Keimigrasian dalam membuat paspor dan dokumen keimigrasian, Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, yang mempunyai bagian seperti Kekayaan Intelektual dalam pendaftaran merk, Administrasi Hukum Umum dalam pengawasan notaris, Penyuluh-

an Hukum dalam pembentukan desa sadar hukum, Bidang HAM dalam pembangunan kota/kabupaten peduli HAM, dan di Bidang Hukum dalam pengharmonisan peraturan daerah.

“Terima kasih atas sambutan yang telah diberikan oleh Bapak Bupati, Mu-





Maengunjungi rumah produksi foto dan video di Uluan Nughik

dah-mudahan silaturahmi ini dapat kita lanjutkan tidak hanya dalam keadaan formal, dan komunikasi dapat terus terjalin”, ujar Plt. Kanwil Kemenkumham Lampung.

Diakhir sambutan, Bupati dan Plt. Kepala Kantor Wilayah masing-masing memberikan cendera mata. Acara dilanjutkan dengan kunjungan langsung ke destinasi wisata yang ada di Tulang Bawang Barat, menyambangi Islamic Center yang menjadi daya Tarik tersendiri bagi masyarakat di Tubaba dan Provinsi Lampung. Kunjungan dilanjutkan ke Rumah Baduy, Politeknik Tunas Garuda, Uluan Nughik, Taman Batu Las Sengok yang mempunyai ciri khas bila dilihat melalui udara tampak seperti orion (rasi bintang).

Dalam kunjungan ke beberapa tempat wisata yang didampingi langsung oleh Bupati yang Energik, Ida asep menilai bahwa Tubaba mempunyai potensi maupun daya Tarik tersendiri yang tidak dimiliki dengan pariwisata di daerah lain.





Kanwil Lampung Gelar Acara Sosialisasi Teknis Pemasyarakatan dengan Tema Pengembangan SPPT-TI Bersama APH

Jumat (25/06/2021) Dalam rangka menjalankan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia dibutuhkan sebuah sinergitas antara Aparat Penegak Hukum baik di tingkat wilayah maupun di tingkat daerah.

Memenuhi hal itu Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Ham Lampung melalui Divisi Pemasyarakatan menggelar acara Sosialisasi Teknis Pemasyarakatan dengan Tema Pengembangan Sistem Penanganan Perkara Tindak Pidana Secara Terpadu Berbasis Teknologi Informasi (SPPT-TI) Bersama Aparat Penegak Hukum (APH) Dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Prima Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/ Wila-



Kepala Divisi Pemasyarakatan, Farid Junaedi secara resmi membuka jalannya kegiatan

yah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Tahun 2021. Bertempat di Hotel Golden Tulip, acara yang diikuti oleh 125 peserta yang ter-

diri dari Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan jajaran Kantor Wilayah Lampung beserta rombongan, Kejaksa-



Penyerahan Penghargaan Kepada Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan Sebagai Pengelola Data Base Pemasarakatan (SDP) Terbaik Semester I Th 2021

an Tinggi Lampung, Pengadilan Tinggi Tanjung Karang, Kepolisian Daerah Lampung, Kepolisian Resor Tanggamus, Kepolisian Resor Lampung Utara, Kepolisian Resor Metro, Kepolisian Resor Lampung

Selatan, Kepolisian Resor Lampung Tengah, Kepolisian Resor Lampung Timur, Kepolisian Resor Tulang Bawang, dan Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, JFU dan JFT di Lingkungan Kan-

tor Wilayah Kemenkumham Lampung.

Acara dibuka secara resmi oleh Kepala Divisi Pemasarakatan, Farid Junaedi mewakili Plt. Kepala Kantor Wilayah menyampaikan kegiatan ini merupakan 3 (tiga) Pemasarakatan Maju arahan Dirjen PAS yaitu tentang sinergitas antar Aparat Penegak Hukum (APH). Farid berharaa dengan acara ini hubungan APH baik di wilayah dan daerah akan terjaga, hal ini akan berdampak baik khususnya di seluruh jajaran kantor wilayah lampung. Selanjutnya, Farid memberikan Penyerahan Penghargaan Kepada Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan Sebagai Pengelola Data Base Pemasarakatan (SDP) Terbaik Semester I Th 2021 secara simbolis dengan Klasifikasi Terbaik 1 dan Terbaik 2 pada Rutan, Lapas, dan Bapas di Lingkungan UPT Pemasarakatan Kantor Wilayah Lampung.



Staf ahli Menteri Hukum dan HAM Bidang Hubungan Antar Lembaga, Dhanana Putra saat memberikan pemaparan

Melanjutkan kegiatan, sosialisasi menghadirkan 5 (lima) narasumber yaitu Sastra Budi dari Polda Lampung, I Wayan Suardi dari Kejaksaan Tinggi Lampung, Abdul Siboro dari Pengadilan Tinggi Tanjung Karang, Dhaha-



Pemateri terakhir, Direktur Teknologi Informasi dan Kerjasama, Dodot Adikoeswanto

na Putra selaku Staf Ahli Menteri Hukum dan HAM RI Bidang Hubungan Antar Lembaga, Dodot Adikoeswanto selaku Direktur Teknologi Informasi Dan Kerjasama.

Pemateri pertama, Sastra Budi menjelaskan tentang Sistem Penanganan Perkara Tindak Pidana Secara Terpadu Berbasis Teknologi Informasi, dimana Kepolisian Republik Indonesia telah melaksanakan MoU dengan Kementerian Hukum dan HAM RI dalam rangka Optimalisasi Tugas, Fungsi

di Bidang Hukum dan HAM. Di lanjutkan materi kedua oleh I Wayan dan Pemateri ketiga oleh Abdul Siboro menerangkan tentang Perma Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik.

Staf ahli Menteri Hukum dan HAM Bidang Hubungan Antar Lembaga, Dhanana Putra yang turut menjadi narasumber dalam kegiatan sosialisasi menjelaskan bahwa Tahapan Proses Peradilan

Pidana memiliki unsur Penyidikan dari Kepolisian, Penuntutan dari Kejaksaan, Pemeriksaan dari Pengadilan, Pendampingan Hukum dari Advokat, dan Pembinaan dari Petugas Pemasaryakatan. Dhanana memperjelas bahwa SPPT-TI merupakan bentuk Pengembangan Sistem Peradilan Pidana diarahkan pada Terwujudnya Keterpaduan Antar Sub Sistem yang ada di dalam Sistem Peradilan Pidana dalam Mempercepat dan Mempermudah Proses Penanganan Perkara yang Transparan dan Akuntabel.

Selaku pemateri terakhir, Direktur Teknologi Informasi Dan Kerjasama, Dodot Adikoeswanto menjelaskan bahwa dengan terselenggaranya pertukaran data perkara pidana berbasis Teknologi Informasi yang transparan, efektif, efisien untuk menekan jumlah overstaying dengan penerapan Teknologi Informasi dan Pertukaran data antar institusi penegak hukum

Di setiap akhir narasumber memberikan materi, dilakukan pula sesi tanya jawab antara peserta dan narasumber, tampak para peserta bersemangat dengan dibuktikan banyaknya pertanyaan dalam kegiatan ini.





Sosialisasikan Perubahan UU Ormas, Kanwil Kemenkumham Lampung Dorong Peran Serta Ormas Dalam Keutuhan NKRI

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Lampung menggelar sosialisasi Layanan Administrasi Hukum Umum tentang Undang-undang (UU) Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan PP Pengganti UU Nomor 2 Tahun 2017 tentang perubahan atas UU Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Menjadi UU. Kegiatan yang berlangsung pada hari ini, Senin (14/06) bertempat di Ballroom Radisson Hotel Lampung yang dihadiri langsung oleh Plt. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung, Ida Asep Somara.



Sebagai pembuka, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Nur Ichwan selaku Ketua Panitia menyampaikan, sosialisasi layanan AHU ini menghadirkan tiga narasumber. Yakni. Nuzmir, S.Sos., M.M. (Kabid Ketansos & Kemasyarakatan Kesbangpol Lampung); Kolenel Kav.Thomas Rudyanto, S.H. (Kasiter Kasrem 043/Gatam); dan Adi Kurniawan (Analisis Pendapat Hukum dan Advokasi Direktorat AHU) serta dimoderatori oleh Kabid Pelayanan Hukum, Ignatius Mangantar Tua Silalahi.

Plt. Kakanwil Kemenkumham Lampung Ida Asep Somara dalam sambutannya menjelaskan bahwa Undang-Undang tentang Ormas telah memberikan pedoman atau batasan bagaimana ormas harus dijalankan.



“Ormas harus menghargai hak-hak asasi orang lain, ormas harus menjaga ketertiban umum atau ketertiban publik, ormas harus mengindahkan etika dan moral dan ormas harus menjaga keamanan nasional” terang Ida.

Selain itu, Ida berharap kegiatan ini dapat memperkuat wawasan kebangsaan dan ideologi bagi ormas-ormas yang ada di Lampung. Juga menumbuhkan kesadaran ormas untuk menjaga agar tidak tumbuh ideologi - ideologi yang bertentangan dengan ideologi pancasila. Sehingga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) akan tetap terjaga.

Dalam agenda yang diikuti sekitar 150 Ormas tersebut, Adi Kurniawan menjelaskan Kemenkumham melalui Ditjen AHU memiliki kewenangan baru untuk memberikan sanksi administratif kepada Ormas berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum yang me-



Adi Kurniawan (Analisis Pendapat Hukum dan Advokasi Direktorat AHU) sedang memberikan penjelasan



Kolonel Kav.Thomas Rudyanto menyampaikan materi tentang peran serta Ormas dalam keutuhan NKRI

lakukan pelanggaran.

“Pengawasan tingkat kota/kabupaten dilakukan Wali Kota melalui Kesbangpol. Sedangkan pengawasan di tingkat provinsi dilakukan oleh Gubernur dalam hal ini Kesbangpol provinsi dan untuk pelanggaran lintas provinsi akan diawasi oleh pemerintah pusat,” ungkap Adi.

Selanjutnya, Kolonel Kav.Thomas Rudyanto menyampaikan materi tentang peran serta Ormas dalam keutuhan NKRI. “Ormas harus mampu mengaktualisasi

diri untuk peka dan bela negara dalam menjaga keutuhan NKRI,” imbau Thomas.

Sementara itu, Nuzwir memaparkan mengenai peran Badan Kesbang dan politik dalam pengawasan dan pembinaan ormas di Lampung. Dalam kesempatan yang sama, Naswir meminta sesama Ormas untuk mengutamakan sistem kemitraan. “Mari kita saling bantu dan bahu-membahu untuk menjaga keutuhan NKRI,” tutup Nuzwir.



Deteksi Dini Gangguan Kamtib dan Cegah Peredaran Narkoba, Jajaran Pemasyarakatan Gelar Razia Serentak

Jajaran Pemasyarakatan Kanwil Kemenkumham Lampung lakukan razia serentak sebagai langkah deteksi dini mencegah adanya peredaran gelap narkotika dan gangguan keamanan dan ketertiban pada Minggu (13/06/2021).

Razia serentak ini merupakan tindak lanjut dari arahan Direktur Jenderal Pemasyarakatan, Reynhard Silitonga untuk membangun Pemasyarakatan yang maju yaitu dengan deteksi dini gangguan keamanan dan ketertiban, membe-rantas peredaran narkotika, serta sinergi dengan aparat penegak hukum. Razia serentak di Lapas dan Rutan ini dipimpin langsung oleh masing-masing Kepala Satuan Kerja dengan melibatkan Satuan Operasional Kepatuhan Internal Pemasyarakatan (SATOP-SPATNAL).

Dari hasil razia serentak tersebut ditemukan handphone, kartu remi, potongan besi, sendok besi, speaker active, kaca, kabel-kabel dan terminal listrik, serta termos air panas, alat pewangi ruang-



Razia serentak di Lapas dan Rutan ini dipimpin langsung oleh masing-masing Kepala Satuan Kerja dengan melibatkan Satuan Operasional Kepatuhan Internal Pemasyarakatan (SATOPSPATNAL).

an sendok semen. Hasil temuan nantinya akan segera ditindak-lanjuti dan dilaporkan, karena kegiatan ini merupakan komitmen bersama untuk mengantisipasi peredaran gelap narkoba dan mewujudkan Satuan Kerja Pemasyarakatan yang bebas Halinar (Handphone, Pungli dan Narkoba). Tidak berhenti disini, razia serentak ini akan terus dilaksanakan secara rutin di masing-masing Satuan Kerja Pemasyarakatan.





Plt. Kakanwil Monitoring dan Evaluasi Realisasi Anggaran Semester I Pada Satuan Kerja Secara Virtual

Kamis (17/06/2021) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Lampung melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Realisasi Anggaran Semester I Tahun 2021 pada Satuan Kerja secara Virtual Zoom Meeting.

yah, Pelaksana Tugas Kepala Kantor Wilayah, Ida Asep Somara didampingi Kepala Bagian Program dan Humas, Basnamara dan Turut hadir Kepala Sub Bagian Program dan Pelaporan, Gunawan Ali beserta jajaran.

Selaku Moderator, Basnamara menjelaskan Pelaksanaan Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Anggaran akan memasuki Semester ke-2, dan terpantau masih terdapat Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang penyerapannya di Semester ke-1 masih rendah.

Selanjutnya, Ida Asep Somara memberikan arahan bahwa secara terjadwal pada awal Juli Kementerian Hukum dan HAM akan melaksanakan Evaluasi Kinerja Anggaran bagi setiap kantor wilayah seluruh Indonesia. Hal itu untuk mengukur dan menilai sampai sejauh mana capaian kinerja pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM. Ida Asep menegaskan terkait dengan langkah-langkah strategis yang akan diambil, serta upaya-upaya dalam mengejar ketertinggalan bagi Satuan Kerja jajaran Kantor Wilayah untuk mengantisipasi defiasi terjadinya minus pada capaian kinerja anggaran.

“Saya meminta untuk KPA Satuan Kerja di jajaran Kantor Wilayah Lampung untuk memerintahkan kepada para pengelola keuangan untuk melakukan reschedule maupun mengatur Disbursement Plan secara seksama dan melakukan penyesuaian-penyesuaian kegiatan” Ucap Ida Asep

“Secara keseluruhan Kantor Wilayah Lampung untuk realisasi anggaran cukup baik dengan totalnya 47,89% yang melebihi dari target nasional” Ujar Ida Asep.

Namun demikian, Ida Asep menjelaskan bahwa terkait belanja barang (operasional maupun non operasional), berdasarkan Analisa angka terdapat 14 Satuan Kerja secara akumulatif masih dibawah 45%. “Untuk menjadi perhatian, karna kita memiliki sisa waktu 15 hari hingga 31 juni.” Tegaskan Ida Asep.





Cegah Penyebaran Covid 19, Ketua Komisi I DPRD Propinsi Lampung Gandeng Penyuluh Hukum Kemenkumham Lampung

Ketua Komisi I DPRD Provinsi Lampung Yozi Rizal, SH dengan menggandeng Tim Penyuluh Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung mengadakan Sosialisasi Perda Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2020 tentang Adaptasi kebiasaan baru dalam pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease (Covid) 19 di Kampung Argomulyo, Kecamatan Banjir Kabupaten Way Kanan. (Jum'at, 18/06/2021)

Acara dibuka oleh anggota DPRD Kab Way Kanan, kemudian di lanjutkan oleh Yozi Rizal. Pada sesi pemberian materi tentang Peraturan Daerah Provinsi Lampung oleh Tim Penyuluh Hukum Kanwil Lampung yg disampaikan oleh Melda sulastriyawati yang di lanjutkan dengan materi tentang bantuan hukum gratis bagi masyarakat tidak mampu yang disampaikan oleh Indrawati Imron.

Pada materi pertama tentang Perda nomor 3 tahun 2020 ini jelas diatur sanksi pelanggaran terhadap pelaksanaan adaptasi kebiasaan baru dalam pencegahan

dan penanganan covid 19.

Adaptasi Kebiasaan Baru adalah penyelenggaraan aktivitas sehari-hari mencakup sosial, budaya dan ekonomi masyarakat dalam mendukung masyarakat produktif dan akan Covid-19. Sedangkan tujuan Peraturan ini diantaranya adalah untuk melindungi masyarakat dari Covid-19 dan/atau faktor resiko kesehatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat; mewujudkan kesadaran bersama dalam rangka mencegah dan mengendalikan penularan Covid-19 di Daerah dengan me-

libatkan peran aktif masyarakat, serta memberikan kepastian hukum pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam pencegahan dan pengendalian Covid-19 di Daerah. Hal ini merupakan kewajiban bersama antara pemerintah daerah dan masyarakat. Saat ini pemerintah sedang melakukan program pemberian vaksinasi bagi seluruh masyarakat Indonesia, untuk itu kita semua wajib mendukung terlaksananya program tersebut guna memutus mata rantai penyebaran Covid-19. Ditegaskan pula terkait pentingnya penerapan protokol kesehatan meliputi 5 M, yaitu Mencuci Tangan, menggunakan masker, menjaga jarak fisik, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas serta terdapat sanksi bagi setiap orang, penanggung jawab kegiatan usaha yang melanggarnya.

Sanksi pelanggaran berupa teguran lisan, teguran tertulis, kerja sosial seperti membersihkan fasilitas umum, denda administratif, serta daya paksa polisional dapat dilakukan dalam bentuk penjemputan paksa pelanggar oleh petugas untuk ditempatkan pada fasilitas karantina atau isolasi yang telah ditetapkan Pemerintah Daerah.

Dalam kesempatan ini juga kami menyampaikan informasi terkait Bantuan Hukum untuk orang atau kelompok orang miskin yang menghadapi masalah hukum, dilaksanakan oleh Organisasi bantuan hukum terverifikasi dan terakreditasi sebagai pemberi bantuan hukum di provinsi Lampung yang saat ini berjumlah 17 OBH. Jenis Bantuan hukum yang diberikan yaitu Litigasi dan Non Litigasi baik Pidana, Perdata, dan Tata Usaha Negara. Syarat memperoleh bantuan hukum diantaranya melampirkan Surat Keterangan Miskin serta dokumen lain yang diatur dalam Undang-undang nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.



Tim Penyuluh Hukum Sosialisasikan Perda Provinsi Lampung No. 3 Tahun 2020 tentang Adaptasi kebiasaan baru dalam pencegahan dan



Peserta sosialisasi dan penyuluhan dari Kampung Argomulyo, Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan



Kanwil Lampung Selenggarakan Kegiatan Edukatif Terkait Penyusunan Prolegda, Naskah Akademik Serta Pedoman Analisis dan Evaluasi Hukum

Bertempat di Edelweiss Meeting Room, Hotel Golden Tulip, Bandar Lampung, Selasa (22/06/2021) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung menggelar Kegiatan Peningkatan Pemahaman Penyusunan Prolegda, Naskah Akademik dan/atau Penerapan Pedoman Analisis dan Evaluasi Hukum Tahun Anggaran 2021.

Kegiatan yang digelar selama 2 (dua) hari ini, dihadiri oleh para peserta dari Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten/Kota, Sekre-

tariat DPRD Kabupaten/Kota dan para Perancang Peraturan Perundang-undangan Kantor Wilayah Kemenkumham Lampung.

Acara turut dihadiri oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Nur Ichwan, didampingi oleh Kepala Bidang Pembinaan, Bimbingan, dan TI, Mishbahuddin, Kepala Bidang Pelayanan Tahanan, Kesehatan, Rehabilitasi, Pengelolaan Benda Sitaan, Barang Rampasan Negara, dan Keamanan, Yuniarto, dan Kepala Sub Bidang Pembentukan Produk Hukum Daerah, Masriakromi.





Kabid Hukum, Rugun Pakpahan selaku Ketua Panitia melaporkan tentang pelaksanaan penyelenggaraan Kegiatan



Apri Listyanto dari BPHN menjelaskan Urgensi dan Teknik Evaluasi Peraturan Perundang-undangan

Memulai acara, Kepala Bidang Hukum, Rugun Tresia OP selaku Ketua Panitia melaporkan tentang pelaksanaan penyelenggaraan Kegiatan. Selanjutnya, Plt. Kepala Kantor Wilayah, Ida Asep Somara memberikan sambutan serta membuka secara resmi Kegiatan Peningkatan Pemahaman Penyusunan Prolegda, Naskah Akademik dan/atau Penerapan Pedoman Analisis dan Evaluasi Hukum Tahun Anggaran 2021.

Dalam sambutannya, Ida Asep menjelaskan bahwa kenyataannya pada saat ini masih banyak penyusunan dokumen perencanaan

pembentukan produk hukum daerah yang belum memenuhi prosedur yang telah ditetapkan untuk itu perlu menjadi catatan kita bersama untuk dapat diperbaiki di kemudian hari.

Ida Asep menerangkan Kegiatan ini adalah salah satu bentuk upaya fasilitatif edukatif yang dilakukan Kanwil Kementerian Hukum dan Peradilan Lampung demi peningkatan pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan Aparatur Sipil Negara yang bekerja di Bidang Hukum dan Peraturan Perundang-undangan khususnya dalam hal penyusunan perencanaan produk hukum daerah. Untuk itu Ida berharap para peserta kegiatan dapat mengikuti dan berperan aktif dalam kegiatan ini dengan sebaik-baiknya sampai dengan selesai.

Acara dilanjutkan dengan pemateri pertama dari Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM membahas terkait Urgensi dan Teknik Evaluasi Peraturan Perundang-undangan, pemateri kedua dari Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM membahas terkait Penyusunan Propemperda sebagai Instrumen Pembaruan Hukum dan Penederhanaan Regulasi Daerah, dan pemateri terakhir pada hari ini dari Biro Hukum Provinsi Lampung membahas tentang Jenis Dokumen Perencanaan Pembentukan Produk Hukum Daerah dan Mekanisme Penyusunannya.



Persiapan Penilaian Kab/Kota Peduli HAM, Kadiv Yankum Audiensi dengan Sekda Pemkab Pesawaran

Hari ini, Rabu (23/06) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung melakukan audiensi dengan Pemerintah Kabupaten Pesawaran terkait pengisian kuesioner dan data pendukung dalam rangka penilaian kriteria Kabupaten/Kota Peduli HAM. Kegiatan kunjungan ini merupakan tindak lanjut hasil rapat koordinasi Kabupaten/Kota peduli HAM yang di adakan di Kantor Wilayah Lampung lusa sebelumnya.



Sekretaris Daerah Pemkab Pesawaran, Kesuma Dewangsa menyampaikan bahwa kesiapan Kabupaten Pesawaran Tahun ini lebih matang



Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Nur Ichwan memberikan penjelasan teknis terkait KKP-HAM

Dalam kunjungan ini, Kantor Wilayah Lampung diwakili oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM : Nur Ichwan bersama Kepala Sub Bidang Pemajuan HAM : Ferie Irza Irawan beserta staf yang mendampingi diterima langsung oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Pesawaran : Kesuma Dewangsa didampingi. Hadir pula Asisten I Sekda dan Kepala Bagian Hukum serta para pemangku Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diantaranya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dan Bappeda Kabupaten Pesawaran. Audiensi yang berlangsung di Ruang Rapat Teluk Merapai Kabupaten Pesawaran membahas mengenai persiapan data dukung Pemerintah Kabupaten Pesawaran untuk mendapatkan penghargaan Kabupaten/Kota Peduli HAM (KKP-HAM). Dalam kesempatan ini Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Nur Ichwan mengatakan bahwa pengisian kuesioner dan data dukung harus sesuai dengan

"Kami siap membantu jika ada yang perlu ditanyakan terkait pemenuhan dengan point-point yang tercantum dalam kuesioner dan data dukung, jangan ragu untuk berkoordinasi dengan Kantor Wilayah Lampung." pungkas Ichwan.

data di lapangan, diperlukan juga kerjasama antar OPD sehingga data yang dibutuhkan dapat terpenuhi seluruhnya. Menurutnya, fasilitas pendukung yang ada di Kabupaten Pesawaran sudah masuk dalam kriteria Kabupaten/ Kota Peduli HAM.

Selanjutnya, Sekretaris Daerah Pemkab Pesawaran, Kesuma Dewangsa menyampaikan bahwa kesiapan Kabupaten Pesawaran Tahun ini lebih matang, setiap

"Kami akan mempersiapkan data-data apa saja yang dibutuhkan, dan tahun ini kami lebih siap sehingga tahun ini kami optimis Kabupaten Pesawaran akan mendapat penghargaan Kab/Kota Peduli HAM." ucap Kesuma.





Kanwil Kemenkumham Lampung Fasilitasi Harmonisasi Ranperda di Kabupaten Tulang Bawang dan Tulang Bawang Barat

Kamis (24/06/2021) Kanwil Kemenkumham Lampung lakukan fasilitasi harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) di Kabupaten tulang bawang barat dan Tulang Bawang Barat.



Tim yang dipimpin Kabid Hukum Rugun Pakpahan diterima langsung oleh Budi Sugiyanto, Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat beserta jajaran



Tim Kedua yang bertolak ke Kabupaten Tulang Bawang diterima oleh Anuari, Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Tulang Bawang

Tim yang terdiri dari JFT Penyusun Perancang Undang-undang ini dibagi menjadi dua tim, Tim Pertama dipimpin oleh Kepala Bidang Hukum Kanwil Kemenkumham Lampung, Rugun Pakpahan beranggotakan Adi Ismanto, Gunawan, Herliana Husein, Eliyani di Kabupaten Tulang Bawang Barat. Sedangkan Tim Kedua beranggotakan M. Ali Badary, Hapsoro Adhinugroho, Euis Meivia, Febrina Anitasari di

Kabupaten Tulang Bawang.

Tim pertama diterima langsung oleh Budi Sugiyanto, Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat beserta jajaran. Dilanjutkan dengan pembahasan Ranperda tentang perubahan atas Perda Nomor 4 Tahun 2012 tentang retribusi jasa umum, dan Ranperda tentang Penerapan Disiplin dan Protokol Kesehatan pada Adap-

tasi Kebiasaan Baru sebagai Upaya Pencegahan Covid 19.

Rugun menyampaikan jika fasilitasi harmonisasi Ranperda ini bertujuan meningkatkan kualitas produk hukum daerah serta meminimalisir disharmonisasi rancangan peraturan daerah baik dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan kesusilaan.

Sedangkan Tim Kedua yang bertolak ke Kabupaten Tulang Bawang diterima oleh Anuari, Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Tulang Bawang. Anuari menyambut baik respon cepat Kanwil Kemenkumham Lampung dalam pengharmonisasian Ranperda tentang Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019. "Keberadaan Perda ini sangat dibutuhkan sebagai dasar dan kepastian hukum dalam melaksanakan adaptasi kebiasaan baru dalam berbagai aktifitas di Kabupaten Tulang Bawang", ujar Anuari. Harapannya kerja sama antara Pemda dengan Kanwil Kemenkumham Lampung dapat ditingkatkan lagi.





Kadiv Keimigrasian Berikan Penguatan Dalam Bidang Teknis dan Fasilitatif Pada Kanim Kotabumi

Kepala Divisi (Kadiv) Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung, Is Edy Ekoputranto, beserta rombongan yang terdiri dari para Pejabat Administrator, Pengawas dan Staf melaksanakan Kunjungan Kerja (Kunker) ke Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Kotabumi, Kamis (24/06). Kunker ini ditujukan untuk penguatan dalam bidang teknis maupun fasilitatif.

Rombongan diterima langsung Kepala Kantor Imigrasi Kelas III Kotabumi, Amrullah Shodiq, beserta seluruh jajarannya, sekaligus mengikuti kegiatan tersebut dengan antusias, semangat dan tetap mengedepankan protokol Kesehatan Covid -19.

Pada kesempatan tersebut, Is Edy langsung memperkenalkan

diri sehubungan dengan penguatan barunya sebagai Kepala Divisi Keimigrasian Kanwil Kemenkum HAM Lampung. Dalam arahannya, beliau menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Kantor Imigrasi kelas III Non TPI Kotabumi.

Kadiv Keimigrasian juga berharap kepada seluruh jajaran dari Kepala Kantor sampai dengan pegawai PNPB agar senantiasa mempunyai komitmen untuk selalu bekerjasama sehingga tugas dan fungsi berjalan dengan optimal serta pemberian layanan kepada masyarakat dapat terwujud lebih baik lagi.

Terlebih, Tahun ini Kantor Imigrasi Kotabumi merupakan Satuan Kerja yang telah lolos dari Tim Penilai Internal untuk diajukan sebagai Satker untuk mendapatkan predikat WBK/WBBM oleh Kemenpan RB sebagai Tim Penilai Nasional. "Terhadap peningkatan Kelas Kantor Imigrasi Kotabumi dari kelas III menjadi Kelas II bah-

“Berkaitan dengan penyerapan anggaran Tahun 2021 yang sudah memasuki penghujung semester pertama agar penyerapan dapat dioptimalkan dengan baik dan benar menganut azas efektif dan efisien sesuai dengan target yang sudah ditentukan oleh Kementerian Hukum dan HAM RI, lalu terkait dengan pemenuhan data dukung Target Kinerja B 06 Tahun 2021 harus segera di siapkan,” tegasnya.

wa Divisi Keimigrasian senantiasa akan memberikan dukungan yang penuh agar dapat bisa terwujud,” tandas Kadiv.



Kanwil Lampung Gelar Sosialisasi Layanan AHU Pembinaan PPNS Provinsi Lampung

Dalam rangka Pelayanan Administrasi Hukum Umum (AHU) tentang Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi Lampung, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Lampung menggelar Kegiatan Sosialisasi yang bertempat di Hotel Novotel. Kamis (24/06/2021).



Plt. Kepala Kantor Wilayah, Ida Asep Somara membuka jalannya kegiatan

Membuka acara sekaligus memberikan sambutan, Plt. Kepala Kantor Wilayah, Ida Asep Somara menyampaikan bahwa Direktorat Jenderal AHU adalah sebagai pembina PPNS, serta mewujudkan pembentukan jabatan fungsional PPNS sebagai penunjang dan legalitas PPNS dalam penegakan hukum.

Ida Asep menjelaskan Pengalihan jabatan fungsional bagi PPNS ini merupakan bentuk peningkatan profesionalisme dan jenjang karir PPNS. Dimana saat ini, ada sekitar 112 PPNS di Lampung yang mengemban berbagai tugas sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang menaungi tugas dan wewenang PPNS.

Kanwil Kemenkumham Lampung bertindak dalam pembinaan administratif dalam pengangkatan dan pemberhentian PPNS. Untuk bidang tugasnya, lanjut Ida Asep, ada berbagai bidang, diantaranya Penyidik bidang Perikanan, dan Pertanian. Khusus di wilayah Kanwil Lampung ada PPNS bidang Kekayaan Intelektual dan Imigrasi.



"Kami berharap, sosialisasi ini dapat menjadi sarana untuk menampung berbagai persoalan atau kendala yang dihadapi PPNS hingga masukan terkait PPNS yang sekarang menjadi jabatan fungsional," tandasnya.

Kabid Pelayanan Hukum selaku Penanggung Jawab Kegiatan, Ignatius Mangantar Tua Silalahi, S.H., M.H., menyampaikan, sosialisasi ini merupakan sarana diskusi sekaligus ajang menambah pengetahuan mengenai proses penyidikan yang dilaksanakan oleh PPNS di Wilayah Lampung.

Menurut Ignatius, sosialisasi ini diikuti 150 PPNS yang berasal dari Kanwil Kemenkumham Lampung; Kantor Imigrasi Balai Karantina Pertanian Kelas I Bandarlampung; Kanwil Direktorat Jendral Bea Cukai Sumatera Bagian Barat; Kantor BPTD Wilayah VI Provinsi Bengkulu dan Lampung; Dinas Perhubungan; Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan; Dinas Tenaga Kerja; Satuan Polisi Pamong Praja; Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan; Dinas Perindustrian dan Perdagangan; Balai Pengamanan dan Penegakkan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan; Dinas Kehutanan; Dinas Kelautan dan Perikanan; Dinas Tata Ruang PUPR; dan lainnya.

Kegiatan yang dimoderatori oleh Ignatius ini menghadirkan tiga narasumber. Yakni Mohamad Yunus Affan, S.H., M.H. selaku Direktur Pidana, Ditjen AHU, Veri Efriyadi, S.H., M.H. selaku Kasi Korwas PPNS Ditreskrimsus Polda Lampung, dan Fathoni, S.H., M.H. selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung.



Mohamad Yunus Affan Direktur Pidana, Ditjen AHU, menyampaikan materinya melalui virtual zoom meeting



Veri Efriyadi, Kasi Korwas PPNS Ditreskrimsus Polda Lampung, memaparkan materi mengenai tantangan dan hambatan PPNS dalam melaksanakan penegakkan hukum.

Pemateri pertama melalui virtual zoom meeting, Mohamad Yunus Affan menyampaikan, Ditjen AHU sebagai pembina PPNS akan mewujudkan pembentukan Jabatan Fungsional PPNS agar nantinya dapat meningkatkan karir secara profesional dan kesejahteraan yang otomatis akan meningkatkan penegakan hukum secara profesional. Dilanjutkan oleh pemateri kedua, Veri Efriyadi memaparkan materi mengenai tantangan dan hambatan PPNS

dalam melaksanakan penegakkan hukum. Dia mengingatkan agar PPNS menjalin hubungan dan harmonis, bekerja sesuai tupoksi dan menghormati tugas masing-masing. Pemateri Terakhir, Fathoni memaparkan materi terkait legalitas pelaksanaan PPNS. Acara dilanjutkan dengan sesi tanya jawab yang disambut antusias oleh para peserta.



Plt. Kakanwil Kemenkumham Lampung Ikuti Puncak Peringatan HANI 2021 Secara Bersama Melalui Virtual

Badan Narkotika Nasional (BNN) menggelar Puncak Peringatan Hari Anti Narkotika Internasional (HANI) 2021 dengan mengusung Tema Perang Melawan Narkotika (War on Drugs) di Era Pandemi Covid-19 Menuju Indonesia Bersih Narkotika (BERSINAR) digelar secara Live dari Istana Negara. Senin (28/06/2021)

Di Aula Dhira Brata, Kantor BNN Provinsi Lampung, Plt. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung, Ida Asep Somara mengikuti acara peringatan bersama dengan Kepala BNN Provinsi Lampung, Jafriedi melalui virtual.

Peringatan HANI di Indonesia tahun ini mengusung tema War on Drugs yang berarti perang melawan narkotika di masa pandemi Covid-19 menuju Indonesia Bersih Narkotika (Bersinar).

Dalam sambutan yang dibacakan oleh Wakil Presiden, Ma'ruf Amin mengatakan perang melawan narkotika di Indonesia memerlukan kerja sama sinergis antara seluruh pihak baik di tingkat

regional, nasional, dan internasional.

"Penyalahgunaan narkotika harus ditangani bersama-sama melalui sinergi semua lembaga. Sebab, tanggung jawab penanganan narkotika tidak hanya BNN tetapi juga membutuhkan dukungan berbagai pihak," ucap Ma'ruf Amin

Upaya penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkotika, lanjut Wapres, harus dilakukan secara tegas kepada para pelaku. Selain itu, tindak pidana pencucian uang (TPPU) dari penyalahgunaan narkotika juga harus diperangi



7 KARAKTER PRIBADI AGUNG UNTUK MEWUJUDKAN KEAGUNGAN ORGANISASI

1. Bekerja dan berkarya dalam rangka pengabdian kepada Allah SWT dan rakyat
2. Meyakini selalu diawasi Allah SWT dan menyadari bahwa jika berbuat baik pasti dibalas dengan kebaikan dan berbuat buruk pasti dibalas keburukan
3. Semangat belajar tiada akhir dan menciptakan beragam inovasi untuk kemudahan layanan
4. Hidup sederhana dengan *take home pay* yang halal
5. Mengeliminasi keserakahan terhadap kekuasaan dan harta
6. Merespon semua keberhasilan dengan syukur dan rendah hati
7. Menyikapi kegagalan dengan berfikir positif tentang hikmah sembari mencari solusi tepat



RAZILU

INSPEKTUR JENDERAL KEMENKUMHAM RI

AYO LAWAN COVID-19

TERAPKAN
PROTOKOL
KESEHATAN

5M!



Mencuci
Tangan



Memakai
Masker



Menjaga
Jarak



Menjauhi
Kerumunan



Mengurangi
Mobilitas